

**Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia
M. Jusuf Kalla**

**Pada Pembukaan
*Indonesia Development Forum (IDF) 2017***

Jakarta, 9 Agustus 2017

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati

Menko Bidang Perekonomian dan para menteri yang hadir,

Kedutaan Australia,

Hadirin-hadirat.

Pertama, marilah kita selalu bersyukur atas kesempatan kita berbicara dalam *Indonesia Development Forum*. Berbicara mengenai ketimpangan, bisa kita lihat dari beberapa sisi perbedaan. Di Amerika Serikat, juga selalu terkenal dengan 1% melawan 99%, artinya ketimpangan yang juga sangat luar biasa. Akan tetapi, dia timpang dalam kemakmuran, sementara kita di Indonesia juga ada ketimpangan, tetapi timpang antara yang miskin dan kaya. Kita sudah timpang, miskin lagi. Ini dua hal yang tentu harus menjadi perhatian kita. Walaupun kadang-kadang saya sedikit agak risih, berbicara kemiskinan di tengah ruang yang begini indah. Itulah sedikit perbedaan, tetapi harus kita kemukakan.

Banyak ukuran untuk melihat ketimpangan. Ada ketimpangan karena pendapatan, ada ketimpangan antarsektor, antara petani, industri, dan sebagainya, dan juga ketimpangan berapa terendah dan tertinggi pendapatan. Di banyak negara tentu timpang, tetapi perbedaannya tidak terlalu tinggi, sementara di Indonesia atau di Jakarta, antara pendapatan terendah dan pendapatan tertinggi bisa ratusan kali perbedaannya, antara upah

minimum regional dan gaji profesional mungkin bisa 100 kali perbedaannya. Itulah yang menjadi perhatian kita bahwa seberapa jauh kita harus melaksanakan perbaikan seperti itu.

Begitu juga, perbedaan pendapatan antarsektor, petani, industri, dan juga profesi lain, ada guru, dokter yang juga mempunyai suatu perbedaan-perbedaan dan menyebabkan ketimpangan terjadi. Namun, pada akhirnya apabila kita ukur kemiskinan karena ketimpangan, utamanya yang harus kita perhatikan ialah produktivitasnya, berapa produktivitas pertanian dan berapa produktivitas bidang-bidang lain sehingga produktivitas tersebut dapat dinaikkan.

Memang banyak upaya yang dapat dilakukan untuk itu. Banyak solusi yang dapat kita laksanakan, solusi fiskal contohnya, dengan pajak. Semakin kaya suatu negara kadang-kadang pajaknya makin tinggi. Skandinavia contohnya, pajaknya bisa 60%, di Amerika Serikat bisa 30–35%, di Eropa sampai 40%, seperti juga di Jerman dan Prancis. Kita dilema karena walaupun ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, pajak selalu kita turunkan bertahap untuk memberikan gairah investasi.

Inilah suatu pikiran yang selalu tecermin di antara kita bahwa pemimpin bangsa ini sejak dahulu telah memberikan tugas kepada kita semua untuk membangun bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sering terjadi pembicaraan, makmur dahulu baru adil atau sejalan adil dan makmur. Tidak mudah menyelesaikan suatu prioritas seperti ini, apakah kue dibesarkan dahulu baru dibagi atau langsung dibagi kuenya. Banyak teori yang mengatakan seperti itu karena tidak mungkin ada yang dibagi tanpa ada kue yang besar. Namun, hanya dengan suatu negara yang stabil pula, kita semua bisa mendapat keadilan yang baik.

Semua era pemerintahan mempunyai program-program yang sangat baik dalam upaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Zaman Bung Karno ada Trisakti, bagaimana ekonomi berdikari, artinya produktivitas kita tinggi. Zaman Soeharto ada Trilogi Pembangunan, bagaimana pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas harus kita capai. Sekarang kita juga menganut teori atau sistem untuk bagaimana pemerataan dapat tercapai. Jadi, pada dasarnya banyak langkah telah diambil selama ini: kebijakan afirmasi tahun 1950-an ada

peningkatan *middle stand*, ada PP 10, kemudian ada kredit investasi kecil (KIK) dan kredit modal kerja permanen (KMKP) pada zamannya, ada pemerataan antardaerah dengan Keppres 15, dan sebagainya. Langkah-langkah tersebut juga mempunyai hasil yang baik, tetapi belum cukup untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada.

Akhir-akhir ini, kita mempunyai afirmasi lagi dengan memberikan program-program kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha kecil, ada afirmasi dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan juga menetapkan upah minimum agar masyarakat memperoleh pendapatan yang layak bagi kehidupannya. Sudah kita gariskan, upah minimum harus tumbuh sesuai dengan pertumbuhan dan inflasi. Itu suatu solusi yang menurut saya mempunyai keadilan bersama, yaitu apabila mempunyai manfaat pertumbuhan kepada masing-masing pihak.

Memang banyak usaha telah dijalankan, tetapi itu belum cukup. Tentu ada hasilnya, terbukti dengan kemiskinan turun. Walaupun persentasenya turun sedikit, angka nominalnya naik sedikit. Itu artinya kita masih stagnan dalam mengurangi kemiskinan. Secara persentase, selama tujuh tahun kita turun 3%. Oleh karena itu, kita harapkan upaya tersebut harus lebih gencar lagi. Upayanya tentu berbeda-beda sesuai dengan zaman dan ideologi ekonomi yang kita alami. Pernah pada tahun 1970 atau 1980-an kita menganut ekonomi yang lebih terbuka, contohnya, kemudian sekarang ini pemerintah kita menganut ideologi di mana negara harus turut campur tangan lebih banyak lagi, mendekati *New Keynesian*.

Oleh karena itu, program-program yang ada di republik ini haruslah sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita secara umum. Rasio gini memang penting, kita bersyukur telah mengalami perbaikan sedikit, tetapi rasio gini tersebut dari segi konsumsi. Kita belum melihat rasio gini dari segi pendapatan. Apabila rasio gini dilihat dari pendapatan, mungkin saja berbeda hasilnya dari rasio gini dari segi konsumsi. Oleh karena itu, dengan usaha dan kerja keras kita semua dalam meningkatkan produktivitas, barulah rasio gini pendapatan atau produktivitas akan menjadi baik semuanya.

Banyak hal dasar yang telah kita jalankan untuk mengurangi kemiskinan dan juga memperbaiki kesenjangan ialah dengan meningkatkan kemungkinan pendapatan golongan masyarakat miskin dan mengurangi pengeluarannya. Dalam mengurangi pengeluarannya, kita tahu semua, sekarang diberikan banyak subsidi, apakah subsidi listrik, bahan bakar, pupuk, dan subsidi yang lain. Subsidi kita pernah mencapai hampir Rp400 triliun, hampir mencapai 20% dari APBN kita pada tahun 2014. Sungguh tinggi. Sekarang ini, karena harga minyak dunia turun, nilai subsidi kita juga turun, tetapi kita tetap memberikan subsidi yang besar, baik untuk bahan bakar, untuk raskin, dan untuk masyarakat kurang mampu. Kita juga memberikan program-program *cash transfer* seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga subsidi lain bagi penduduk.

Semua ini belum cukup, tetapi yang paling penting ialah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan karena subsidi yang diperbesar akan mengurangi kemungkinan kita membangun infrastruktur dan lain-lain. Oleh karena itu, subsidi kredit usaha rakyat (KUR) dan program Dana Desa mestinya diperbaiki dan diperbanyak walaupun hari-hari terakhir ini banyak kritikan tentang cara kita memberikan dana yang begitu besar ke desa-desa, tetapi juga bocor di kalangan menengahnya. Begitu juga, dengan program-program kesehatan, kita sekarang mengalami kemungkinan anak-anak kita kerdil, *stunting*. Begitu juga, pendidikannya yang lebih lagi agar terjadi suatu pemerataan yang baik.

Oleh karena itu, kita mengharapkan pembicaraan dalam *Indonesia Development Forum* juga dapat diserap oleh pimpinan-pimpinan daerah dengan baik karena apa pun yang kita jalankan, pelaksanaannya harus ke daerah. Tanpa pelaksanaan yang baik di daerah karena kita zaman otonomi, sebesar apa pun dana yang kita berikan, akan hilang di tengah. Yang penting ialah bagaimana membimbing masyarakat kita, apakah itu petani, buruh, atau karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya.

Berikutnya adalah kebijakan ekonomi nasional kita harus baik. Ada dua hal yang selalu saya katakan, ada dua kebijakan nasional yang pernah merusak dan sampai sekarang merusak, yaitu menjamin segala macam perbankan dengan *blanket guarantee* dan subsidi

yang begitu besar kepada bahan bakar minyak yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak. Itulah kemudahan yang mempersempit kita untuk membangun. Oleh karena itu, pada akhirnya untuk memperbaiki kesenjangan, mengurangi dan mempersempit kesenjangan ialah dengan meningkatkan pendapatan di kalangan bawah atau yang berpendapatan miskin. Di Jakartalah contoh yang paling baik.

Oleh karena itulah, pembangunan infrastruktur, subsidi pembangunan perumahan, sanitasi adalah suatu contoh yang sebaiknya harus kita laksanakan. Contoh yang paling gampang adalah apabila tidak ada program air bersih yang cepat di lingkungan kita semua, harga air bagi orang-orang yang tinggal di Menteng lebih murah daripada masyarakat yang membeli air ketengan. Itu sungguh tidak adil. Oleh karena itu, keadilan harus diperbaiki dengan program yang ada. Itu semua ditentukan oleh pemerintah daerah. Semua sistem tersebut diatur di pusat, tetapi dilaksanakan di daerah.

Begitu juga halnya dengan lapangan kerja. Sehebat apa pun pendapatan petani pasti tetap akan lebih tinggi pendapatannya orang yang bekerja di industri. Oleh karena itu, kemudahan untuk investasi *manufacturing* di daerah harus lebih dipermudah. Bagaimanapun juga pendapatan petani padi akan meningkat apabila produktivitasnya baik, tetapi harga beras selalu kita kontrol. Di lain pihak, pendapatan buruh yang bekerja di industri selalu kita naikkan setiap tahun, sedangkan harga padi selalu kita tahan kenaikannya. Ini dimaksudkan untuk memberikan lapangan kerja dan juga memberikan pemerataan yang baik. Bagaimanapun juga dibutuhkan industri karena dengan *manufacturing* yang baik akan memberikan pendapatan pajak dan juga lapangan kerja yang baik. Seperti itulah, di samping produktivitas petani juga sangat penting sekali.

Apa pun yang kita bicarakan di sini pada akhirnya intinya ialah bagaimana meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat kita dan mengurangi pengeluaran dari sisi lainnya. Itulah harapan kita. Terima kasih dan saya resmi membuka acara ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh